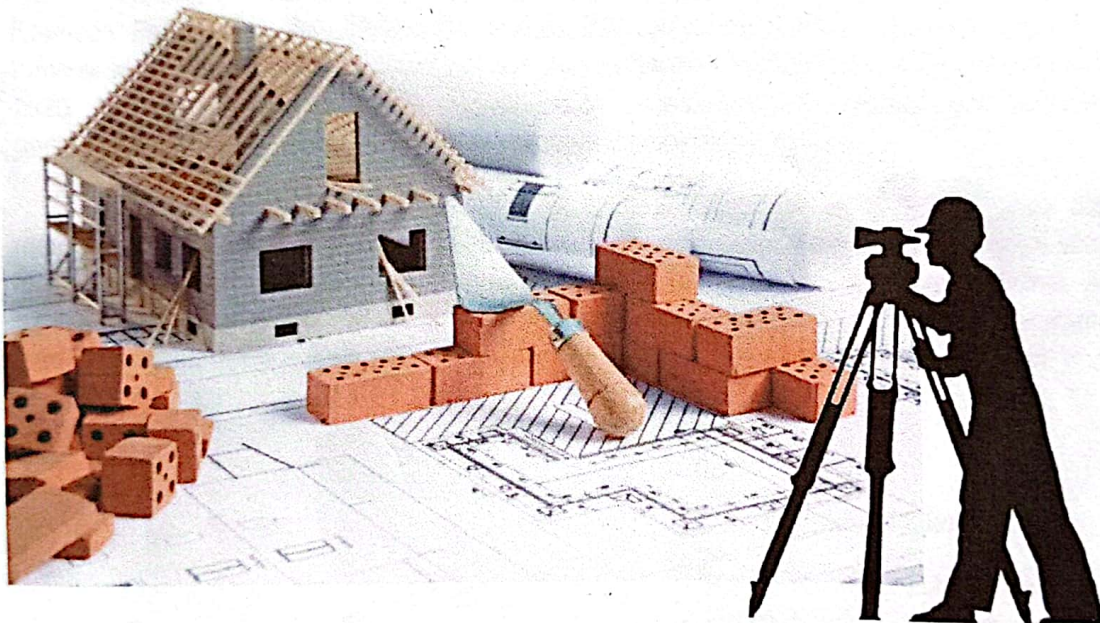




LAKIP

2020

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Sudah selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka instansi pemerintah diuntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang dalam penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tentang kinerja OPD selama tahun 2020. Hasilnya diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah secara akuntabel kepada publik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan kerjasama semua pihak yang telah mendukung penyusunan LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2020, disampaikan limpah terima kasih.

Larantuka, 11 Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP ini dilakukan berdasarkan dokumen realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pengukuran capaian kinerja kegiatan tahun 2020 dengan menggunakan alat ukur dan evaluasi yang sistematis, obyektif, dan transparan dalam rangka kepastian dan akuntabilitas laporan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2020 secara total melaksanakan 8 Program dan 25 Kegiatan. Hasil pengukuran kinerja secara umum pada tahun 2020, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dengan detail belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.683.461.070 untuk membiayai belanja pegawai sedangkan biaya langsung Rp. 9.066.985.698 untuk membiayai 8 Program dan 25 Kegiatan, dengan prosentase capaian per 31 Desember 2020 adalah 99,49%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hasil pengukuran kinerja SKPD dalam skala ordinal temilai sangat baik.

Larantuka, 11 Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Daftar Isi		iii
BAB I : Pendahuluan		1
A. Latar Belakang		1
B. Gambaran Singkat Organisasi		2
C. Dasar Hukum		4
D. Sistematika Penyusunan		5
BAB II : Perencanaan Kinerja		7
A. Perencanaan		7
B. Perjanjian Kinerja		17
C. Penetapan Kinerja		18
BAB III : Akuntabilitas Kinerja		19
A. Capaian Kinerja Organisasi		19
B. Realisasi Anggaran		25
BAB IV : Penutup		26
Lampiran – lampiran		25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya mengandung prinsip kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan keadilan. Keempat hal tersebut harus diwujudkan oleh sebuah daerah otonom seperti halnya Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pelayanannya kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu membentuk berbagai organisasi baik organisasi pemerintahan maupun kemasyarakatan yang memiliki konstelasi adanya pola kemitraan yang nyata sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhir yaitu terwujudnya good governance.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terbentuk dengan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 memiliki dukungan potensi sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas yang variatif untuk mendukung upaya pembangunan di sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tugas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang ada.

B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Dalam upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengemban Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut diatas menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - b. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur terdiri dari unsur :

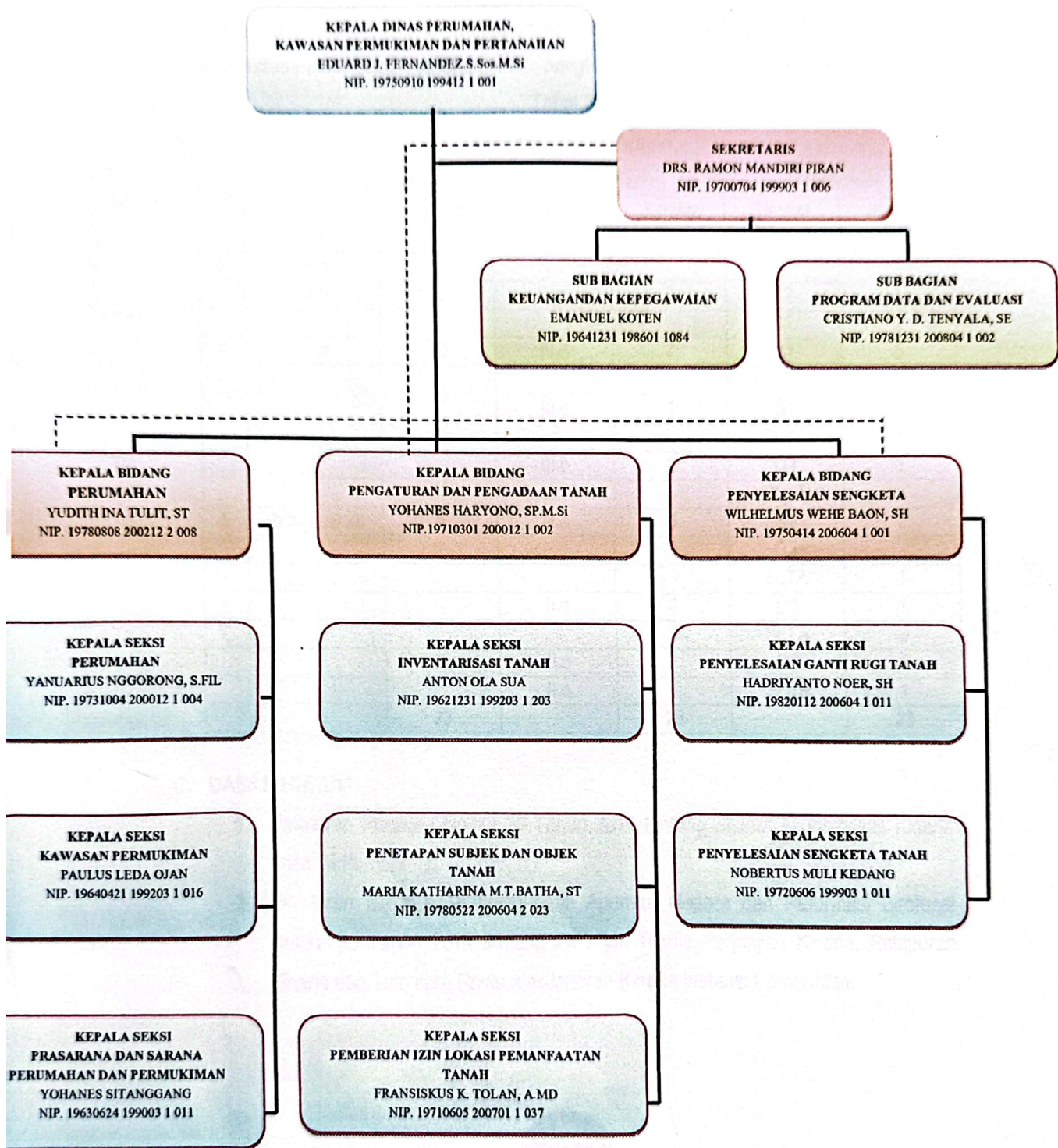
1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari sub bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, sub bagian Program, Data dan Evaluasi.
3. Pelaksana adalah bidang dan seksi yang terdiri dari :
 - a. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- Seksi Perumahan
 - Seksi Kawasan Permukiman
 - Seksi Prasarana dan sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah
- Seksi Inventarisasi Tanah
 - Seksi Penetapan Subjek dan Objek Tanah
 - Seksi Pemberian Izin Lokasi Pemanfaatan Tanah
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
- Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah
 - Seksi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah

Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah No.87 Tahun 2016) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



CATATAN :

———— GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah No.87 Tahun 2016)

Susunan Kepegawalan :

Data jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur menurut eselon, pangkat / golongan dan pendidikan :

Tabel 2.1

Susunan Kepegawalan

No	Eselonering		Pangkat		Pendidikan	
	Eselon	Jumlah	Golongan	Jumlah	Tingkat	Jumlah
1	II.b	1	IV.c	1	S2	1
2	III.a	-	IV.b	-	-	-
3	III.b	3	IV.a	3	S2	1
					S1	2
4	IV.a	10	III.d	7	S1	5
					SLTA	2
			III.c	1	S1	-
					SLTA	1
			III.b	2	D3	1
					SLTA	1
5	Non eselon	9	III.a	3	S1	2
					D3	-
					SLTA	1
			II.d	4	D3	1
					SLTA	3
			II.c	1	D3	1
			II.a	1	SLTP	1
		23		23		23

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur .

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Pemdaahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran singkat Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika Penyusunan

Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Penetapan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Penutup

Lampiran – Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Rencana Strategis

Rencana strategis organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022. Visi misi Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

- a. Visi : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang efektif, merata dan terpadu.
- b. Misi : Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang akan dicapai melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada periode rencana strategi / Renstra Tahun 2018– 2022 sebagai berikut :
 - 1) Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good government
 - 2) Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan
 - 3) Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Tujuan dan Sasaran

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif
- b. Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas
- c. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan Fasilitas Publik
- d. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
- e. Terwujudnya inventarisasi masalah tanah di wilayah kabupaten

Sasaran :

- a. Meningkatnya pelayanan akan prasarana jalan dan Jembatan perdesaan
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan
- c. Meningkatnya ketersediaan lahan untuk pembangunan Fasilitas Publik
- d. Terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
- e. Terdatanya inventarisasi masalah tanah di wilayah kabupaten

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Keberadaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan

pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun pertama sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
 - b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
 - c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur belum optimal.
 - d. Data dan informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum optimal.
 - e. Peran aktif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat,

- b. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung
 - c. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
 - d. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - e. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
 - f. Sering terjadi banjir karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,
 - g. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah.
3. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah dan Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
- a. Minimnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang ada, baik aparat pemerintah Daerah maupun masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah
 - b. Terbatasnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan
 - c. Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah dan hak ulayat

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka langkah – langkah indikatif dan arah tindakan yang menjadi pedoman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama periode Renstra tahun 2018 – 2022 ditetapkan sebagai berikut :

a. Strategi dan Kebijakan :

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017 – 2022.

RUMUSAN PERNYATAAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD DALAM 5 TAHUN MENDATANG

VISI : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanian yang efektif, merata dan terpadu.

Misi : 1. Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good government

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 2. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Pengembangan kemampuan dan Profesionalisme aparatur 4. Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kompetensi aparatur sesuai bidang tugasnya 4. Meningkatkan hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyediaan jasa administrasi perkantoran 2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Penyelenggaraan Bimtek dan pelatihan formal 4. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan pelayanan perkantoran 2. Meningkatkan pelayanan 3. Meningkatkan kualitas SD 4. Meningkatkan upaya pela kinerja dan keuangan
Misi : 2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan			
1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas 2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan permukiman yang berkualitas dan produktif	1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas 2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan permukiman yang berkualitas dan produktif	1. Penyediaan rumah layak huni 2. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman 3. Penyediaan prasarana, sarana permukiman	1. Meningkatkan penyediaan rumah lay 2. Meningkatkan akses air bersih aman layak 3. Meningkatkan akses jalan, jembatan

Misi : 3. Mewujudkan pengelolaan pertanian secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanian				
Mewujudkan pengelolaan pertanian secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanian	1. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah	1. Penegakan status hukum tanah	1. Meningkatkan pemahaman dan ke-	1. Meningkatkan pemahaman dan ke-
	2. Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanian	2. Fasilitasi penyelesaian konflik, penyuluhan hukum pertanian dan Penyusunan Perda tentang pertanian	2. Penyeragaman hukum pertanian dan	2. Penyeragaman hukum pertanian dan
	3. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan	3. Meningkatkan luas lahan milik pemerintah	3. Pembebasan lahan	3. Pembebasan lahan

b. Program dan Kegiatan :

Program adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program / kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- * Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- * Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- * Penyed. Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / Operasional
- * Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- * Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- * Penyediaan Alat Tulis Kantor
- * Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- * Penyed. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- * Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
- * Penyediaan Makanan dan Minuman
- * Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- * Penyediaan Jasa tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- * Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- * Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- * Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 4) Program Pengembangan Perumahan
 - * Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
 - * Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
 - 5) Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - * Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan permukiman
 - * Pembangunan talud pengaman lingkungan
 - 6) Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi
 - * Peningkatan Pelayanan Air Bersih
 - * Peningkatan Pelayanan Limbah Domestik
 - 7) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
 - * Koordinasi Pendaftaran Tanah
 - * Penyusunan Database Bidang Pertanahan
 - 8) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
 - * Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
 - * Penyuluhan Hukum Pertanahan
- b. Perencanaan Anggaran
- Perencanaan anggaran merupakan rencana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran. Adapun rencana kerja anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 adalah :

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO	Uraian	Pagu Dana (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.683.461.070,00

BELANJA LANGSUNG

URAIAN		Pagu Dana (Rp)
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran		635.473.548,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.633.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	26.000.000,00
3	Penyed. Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/Operasional	2.100.000,00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	40.339.000,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.857.000,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.138.500,00
8	Penyed. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.720.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	3.840.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.000.000,00
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	113.336.048,00
12	Penyediaan Jasa tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	387.510.000,00
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		64.200.000,00
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	53.200.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11.000.000,00
III. Program Peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja & keuangan		32.110.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.110.000,00
IV. Program Pengembangan Perumahan		898.709.850,00
1	Fasilitasi dan Stimulasi pemb. Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	884.465.750,00
2	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	14.244.100,00

V. Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman		674.971.500,00
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	526.720.500,00
2	Pembangunan Talud Pengaman Lingkungan	148.251.000,00
VI. Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi		6.651.195.800,00
1	Peningkatan pelayanan Air Bersih	3.613.651.000,00
2	Peningkatan pelayanan Limbah Domestik	3.037.544.000,00
VII. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah		62.657.000,00
1	Koordinasi Pendaftaran Tanah	45.517.000,00
2	Penyusunan Database Bidang Pertanahan	17.140.000,00
VIII. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		47.668.000,00
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	27.628.000,00
2	Penyuluhan Hukum Pertanahan	20.040.000,00
JUMLAH		9.066.985.698,00

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan sebuah pernyataan keseriusan sebuah instansi pelaksana program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja dengan Bupati Flores Timur. Substansi daripada perjanjian kinerja ini mempunyai muatan tanggung jawab instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja untuk dapat mencapai target kinerja sesuai perencanaan. Proses penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta penjabaran program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan OPD pada tahun yang bersangkutan dengan dukungan sejumlah anggaran yang dirinci secara detail pada masing – masing kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai bukti keseriusan pelaksanaan

tugas oleh OPD penyelenggara program dan kegiatan maka dibuatlah perjanjian kinerja antara Bupati Flores Timur dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dalam lampiran LAKIP ini. **(terlampir)**

C. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen organisasi yang baik. Rencana kinerja akan menjadi pedoman bagi pemegang kendali manajemen organisasi dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diharapkan, dan dapat digunakan sebagai alat kontrol apakah organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai perencanaan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran berjalan perlu dimasukkan dalam dokumen penetapan rencana kinerja tahunan. Pada tahun 2020, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan 8 Program dan 25 Kegiatan yang tersebar di tiga bidang dan dua sub bagian pada sekretariat dinas. Program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2020 disertakan dengan dukungan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan – kegiatan dimaksud agar dapat terealisasi secara baik pada tahun 2020. Rincian jumlah program dan kegiatan tahun 2020 dapat terekam dalam Tabel Penetapan Kinerja **(terlampir)**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan /kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Renstra OPD dan Penetapan Kinerja 2020.

Sasaran strategis

Tahun 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, menetapkan 6 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai.

1. Terwujudnya perumahan yang berkualitas
2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas
3. Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif
4. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah
5. Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanahan
6. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi teknis yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berusaha untuk memanfaatkan sumber daya, anggaran dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dengan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur yang ada, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Analisis tingkat keberhasilan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 dan perbandingan pencapaian pada tahun sebelumnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis secara terperinci dijabarkan menurut misi organisasi dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Visi : *"Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang efektif, merata dan terpadu."*

Misi 1 : *Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good goverment*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Meningkatnya kualitas SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good government	Tersedianya Aparatur yang berkualitas	Orang	8	4			
--	---------------------------------------	-------	---	---	--	--	--

Analisis Capaian Kinerja terhadap tabel di atas :

Target jangka menengah yang termuat dalam dokumen rencana strategis OPD untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal adalah 4 orang. Target pada tahun 2018 jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan 8 orang, realisasi 8 orang atau prosentase capaian 100%. Tahun 2019 di targetkan 4 orang dan realisasi 4 Orang prosentase capaian 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan beberapa faktor antara lain faktor umum dari dinas itu sendiri yaitu adanya semangat untuk melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan pembangunan di sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Faktor khusus datang dari pribadi aparatur yakni adanya kesadaran aparatur akan peningkatan SDM sesuai dengan tuntutan pekerjaan agar hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dapat tercapai. Sementara peningkatan kualitas SDM Aparatur yang berkualitas tahun 2020 tidak di dilakukan kegiatannya karena tidak di anggarkan.

Misi 2 : *Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan	Terlaksananya kegiatan pembangunan perumahan	Unit	471	466	58	58	100%

	masyarakat kurang mampu						
Meningkatnya prasarana perumahan	Terfasilitasinya rencana pengembangan kawasan permukiman (RP2KP)	Lokasi	-	6	-	-	
Tersedianya air minum dan sanitasi	1. Meningkatnya jumlah Pelayanan air bersih 2. Meningkatnya jumlah pelayanan limbah domestik	SR	493	376	1092	1092	100%
		Unit	-	439	552	552	100%
Terciptanya kawasan permukiman yang berkualitas dan produktif.	1. Meningkatnya volume konstruksi Jalan Lingkungan yang terbangun 2. Meningkatnya konstruksi Talud Pengaman Lingkungan yang terbangun	Km	1,683 Km	0,855 Km	680 m	680 m	100%
		Lokasi	-	4	1	1	100%

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu merupakan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Target pembangunan BSPS pada Tahun 2020 adalah 58 unit rumah namun realisasinya 58 Unit dari sumber dana APBD II. Dan bantuan swadaya bersumber dari dana APBN Tahap I 200 Unit, APBN Tahap II 200 Unit. dukungan anggaran APBD II sebesar Rp. 884.465.750,- dengan realisasi anggaran Rp. 844.361.000.- atau capaiannya sebesar 99,99%

2. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dengan target 1 Buku namun pada tahun 2020 kegiatan RP3KP di batalkan karena anggarannya di alihkan untuk Covid19 tanggungan dari OPD
3. Kegiatan peningkatan pelayanan limbah domestik merupakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan limbah domestik dengan target 552 Unit dan realisasinya 552 unit dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.037.544.800.- dengan realisasi anggaran Rp. 3.034.768.150.- atau capaiannya 99,91 %
4. Kegiatan peningkatan pelayanan air bersih merupakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Flores Timur dengan target 1092 SR dan realisasinya 1092 SR dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.613.651.000.- realisasi anggaran Rp. 3.582.500.600,- atau capaiannya sebesar 99,14%
5. Pada Tahun 2020 kegiatan pembangunan jalan dan jembatan lingkungan permukiman secara keseluruhan ada 3 paket pekerjaan konstruksi. Ke 3 paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dengan konstruksi beton K125 (rabat beton) sepanjang 680 m dengan rincian desa gelong 330 m, desa bayuntaa 250 m, desa watoone 100 m, untuk pekerjaan konstruksi diatas dana yang dialokasikan sebesar Rp. 526.720.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 526.384.000,- atau capaiannya 99,94%.

Misi 3 : *Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengurangi dan Meminimalisir konflik pertanahan	1. Jumlah Konflik Pertanahan yang difasilitasi	Desa	4	1	4 Desa	4 Desa	100%
	2. Jumlah Penyuluhan Hukum Pertanahan	Kec.	-	3	2 Desa	2 Desa	100%
Bertambahnya Luas Tanah Pemda yang Dibebaskan	1. jumlah koordinasi pendaftaran tanah	Desa	-	4	20 Desa	5 Kec.	100%
	2. Jumlah Penyusunan database bidang pertanahan	Buku	-	-	-	-	100%

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Konflik Pertanahan yang difasilitasi, sasaran pencapaian target pada tahun 2020 adalah Meminimalisir Konflik Pertanahan Publik di Kabupaten Flores Timur. Jumlah desa yang dapat difasilitasi yaitu Desa Sinar Hading, Riangkotek, Leworok, Waiwerang Kota.
Ketersediaan pagu anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah Rp. 27.628.000,00,-dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 27.217.500,00,-atau 98,51 %.
2. Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan. Kegiatan ini meliputi Penyuluhan Hukum Pertanahan yang di laksanakan di 2 desa Kecamatan di Kab. Flores Timur, desa riangkotek dan Desa Sinar Hading. Pagu Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 20.040.000,00- dengan Tingkat penyerapan anggaran mencapai Rp. 20.015.000,00,- atau sebesar 99,88%.
3. Kegiatan Koordinasi Pendaftaran Tanah, sasaran pencapaian target pada tahun 2020 adalah 20 Desa/kelurahan. Jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pendaftaran Tanah adalah Rp. 75.100.000,00 namun karena Covid19 sehingga pagu anggarannya di potong sebesar Rp. 29.583.000,00 maka sisa dana 45.517.000,00,- di alokasikan untuk koordinasi pendaftaran tanah ke lima kecamatan yaitu kec. Ile Mandiri, Kec. Lewolema, Kec. Adonara Barat, Kec. Solor Barat dan Kec. Ile Boleng dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 44.809.337,00,- atau 98,45%.
4. Kegiatan Penyusunan database bidang pertanahan, namun anggarannya belum sampai pada penyusunan buku, baru sebatas pengumpulan sebagian data. Jumlah pagu anggaran yang disediakan adalah Rp. 17.140.000,00,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 16.690.000,00,- atau 97,37%.

Capaian kinerja secara umum pada tahun 2020, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur terhadap 8 Program dan 25 kegiatan yang relevan dengan 6 (enam) sasaran strategis organisasi adalah sebesar 99,49%. Hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator hasil dipilah menurut visi dan misi organisasi OPD seperti terlihat pada tabel di atas.

Prosentase pencapaian penyerapan anggaran secara umum atas semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2020 mencapai 99,49 %. Hal ini mengindikasikan hasil pengukuran kinerja OPD dinilai sangat baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 telah diupayakan dilakukan secara optimal dengan dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Total pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp.10.750.446.768,00,- Dengan detail uraian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.683.461.070,-. Belanja langsung Rp. 9.066.985.698,00 Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 khusus pada belanja langsung mencapai Rp. 9.020.658.337,00 atau prosentase capaian 99,49%. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2020 adalah Rp. 92.226.205,00,- (Biaya langsung Rp. 46.327.361,00 biaya tidak langsung Rp. 45.898.844,00 Secara lebih detail, penjabaran perbandingan antara target dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel realisasi keuangan tahun 2020. *(terlampir)*

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel. Melalui penyajian LAKIP ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur selama tahun 2020 dinilai sangat baik apabila dilihat dari pencapaian secara umum.

Menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin dengan membangun kesamaan persepsi dan kesatuan pemahaman terhadap semua persoalan dengan berbagai pihak yang berkompeten sehingga pada tahun – tahun mendatang pencapaian hasil akan lebih baik sesuai harapan.

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur secara umum melaksanakan 8 program dan 25 kegiatan baik program OPD maupun program urusan dengan 6 sasaran yang hendak dicapai.
- b. Pengukuran capaian kinerja dipetakan menurut visi dan misi organisasi serta 6 sasaran strategis organisasi yang relevan pada 25 kegiatan dilaksanakan pada tahun

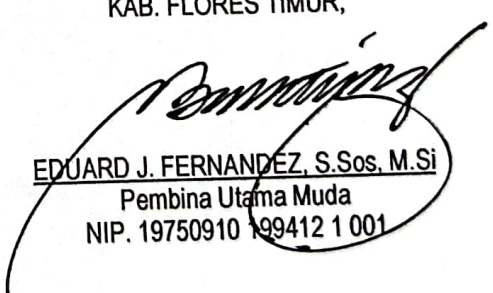
2020. Capaian kinerja terukur sebesar 99,49% dalam skala ordinal penilaian, dinilai sangat baik.

- c. Hasil dari program dan kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai target.
- d. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya : faktor intervensi masyarakat, mekanisme proses, alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, faktor kualitas / ketersediaan SDM pengelola kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan juga belum memadai.

Terhadap berbagai program dan kegiatan serta kendala yang dihadapi sebagaimana terjabar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengharapkan adanya informasi balik berupa masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dalam berbagai kebijakan yang senantiasa dapat dilaksanakan sesuai kondisi obyektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap dimensi. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan melalui laporan ini, kiranya dapat menjadi bahan informasi / evaluasi dan kajian untuk perencanaan pembangunan kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Larantuka, 11 Januari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KA
KAB. FLORES TIMUR,


EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**REALISASI PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp 1,633,000	1,626,000	99.57	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Rp 26,000,000	17,837,401	68.61	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dan tersedianya surat-surat kendaraan	Rp 2,100,000	1,196,250	56.96	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya jasa pelayanan administrasi keuangan yang akuntabel	Rp 40,339,000	40,339,000	100.00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kenyamanan dan kelenangan kerja	Rp 2,857,000	2,852,000	99.82	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rp 20,000,000	19,955,500	99.78	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan	Rp 15,138,500	15,135,000	99.98	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3,720,000	3,610,000	97.04	
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Rp 3,840,000	3,365,000	87.53	
	Penyediaan makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum kantor	Rp 19,000,000	18,977,000	99.88	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi Dalam Daerah Dan Konsultasi Luar Daerah	Rp 113,336,048	113,276,048	99.95	

tabel realisasi anggaran 2020

PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran	Rp 387,510,000	387,396,000	99.97	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Menunjang peralatan kantor yang berfungsi maksimal untuk menunjang operasional kantor	Rp 53,200,000	53,200,000	100.00	
	Peneliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional OPD	Rp 11,000,000	10,930,451	99.37	
Meningkatnya Pengembangan Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 32,110,000	31,953,000	99.51	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan	Program Pengembangan Perumahan					
	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu	Terpenuhinya pembangunan perumahan	Rp 884,465,750	884,361,000	99.99	
	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersusunnya dokumen pembangunan dan pengembangan perumahan	Rp 14,244,100	14,244,100	100.00	
Meningkatnya Pengembangan Prasarana Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	Terbangunnya jalan dan jembatan lingkungan permukiman	Rp 526,720,500	526,366,000	99.93	
	Pembangunan Talud dan Pengaman Lingkungan	Terbangunnya talud pengaman lingkungan	Rp 148,251,000	148,020,000	99.84	
Meningkatnya Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi					
	Peningkatan Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih	Rp 3,613,651,000	3,582,500,600	99.14	
	Peningkatan Pelayanan Limbah Domestik	Meningkatnya pelayanan limbah domestik	Rp 3,037,544,800	3,034,768,150	100	

tabel realisasi anggaran 2020

PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
Terjaminnya kepastian Hukum Tanah	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah					
	Koordinasi Pendaftaran Tanah	Meningkatnya Pendaftaran Tanah	Rp 45,517,000	44,809,337	98.45	
	Penyusunan Data Base Bidang Pertanahan	Tersusunnya Data Base Bidang Pertanahan	Rp 17,140,000	16,690,000	97.37	
Mengurangi dan meminimalisir konflik pertanahan	Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan					
	Facilitasi Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan	Meminimalisir konflik-konflik pertanahan	Rp 27,628,000	27,217,500	98.51	
	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Terkoordinasinya penyuluhan hukum pertanahan	Rp 20,040,000	20,015,000	99.88	
J U M L A H			Rp 9,066,985,698	9,020,640,337	99.49%	

Larantuka, 28 Desember 2020

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kepala Dinas Perumahan

EDUARD J. FERNANDEZ S.Sos, M.S.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

tabel realisasi anggaran 2020

**PENETAPAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	725	Kali
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	12	Bulan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	4	Unit
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	Kali
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18	Jenis
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	29	Jenis
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1112	Buku
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Komponen
		Penyediaan Bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	480	Eksemplar
		Penyediaan makanan dan minuman	1821	Dos
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	125	Kali
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	28	Crang
	2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4	Jenis
		Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional	4	Unit
	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30	Buku
		Program Pengembangan Perumahan		
		Facilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu	50	Rumahan
		Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Buku
	5	Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	3	Lokasi
		Pembangunan Talud dan Pengaman Lingkungan	1	Lokasi
		Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi		
6	Meningkatnya Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Peningkatan Pelayanan Air Bersih	1082	SR
		Peningkatan Pelayanan Limbah Domestik	552	Unit
7	Terjaminnya kepastian Hukum Tanah	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah		
		Koordinasi Pendaftaran Tanah	20	Desa
		Penyusunan Data Base Bidang Perencanaan	1	Buku
8	Mengurangi dan meminimalisir konflik pertanian	Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanian		
		Facilitasi Penyelesaian Konflik - konflik Pertanian	2	Desa
		Penyuluhan Hukum Pertanian	5	Kecamatan

Kegiatan :	Anggaran :			
	Seluruh Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
1	Rp 1.833,000	Rp 1.833,000	1.826,000	99.57
2	Rp 28,000,000	Rp 28,000,000	17.837,401	98.61
3	Rp 2,100,000	Rp 2,100,000	1,196,250	56.96
4	Rp 41,138,000	Rp 40,339,000	40,339,000	100.00
5	Rp 2,857,000	Rp 2,857,000	2,852,000	99.82
6	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	19,955,500	99.78
7	Rp 23,810,000	Rp 15,138,500	15,135,000	99.98
8	Rp 3,720,000	Rp 3,720,000	3,610,000	97.04
9	Rp 3,840,000	Rp 3,840,000	3,365,000	87.53
10	Rp 19,000,000	Rp 19,000,000	18,977,000	99.88
11	Rp 111,050,000	Rp 113,338,048	113,278,048	99.95
12	Rp 388,115,000	Rp 387,510,000	387,386,000	99.97
13	Rp 53,425,000	Rp 53,200,000	53,200,000	100.00
14	Rp 7,000,000	Rp 11,000,000	10,530,451	99.37
15	Rp 30,350,000	Rp 32,110,000	31,953,000	99.51
16	Rp 910,468,000	Rp 884,465,750	884,361,000	99.99
17	Rp 813,655,000	Rp 14,244,100	14,244,100	100.00
18	Rp 527,575,000	Rp 526,720,500	526,366,000	99.93
19	Rp 150,000,000	Rp 148,251,000	148,020,000	99.84
20	Rp 3,773,705,000	Rp 3,613,851,000	3,582,500,800	98.14
21	Rp 3,228,300,250	Rp 3,037,544,800	3,034,788,150	100
22	Rp 75,100,000	Rp 45,517,000	44,900,337	98.45
23	Rp 75,220,000	Rp 17,140,000	16,890,000	97.37
24	Rp 45,180,000	Rp 27,828,000	27,217,500	98.51
25	Rp 85,540,000	Rp 20,040,000	20,015,000	99.88

JUMLAH

Rp 10,418,781,250 Rp 9,020,640,337 99.49

Rp 10,418,781,250 Rp

Rp

BUPATI FLORES TIMUR

ANTONIUS H. GEGE HADJON, ST

